

Submitted: 2 Juni 2021	Accepted: 21 Juni 2021	Published: 11 April 2022
------------------------	------------------------	--------------------------

## ***Woman Trafficking dan Respon Gereja di Nusa Tenggara Timur***

**Ester Mariani Rihi Ga**

Program Pascasarjana Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

*esterrihiga@gmail.com*

### ***Abstract***

*This study was a critical study to the response of the Evangelical Christian Church in Timor (GMIT) towards women trafficking phenomenon in East Nusa Tenggara (NTT). The purpose of this study was to uncover the causes of women trafficking, as well to reveal the church's response to this phenomenon. This research was conducted by a qualitative method. In this study, it was revealed that the perception of women as the second sex in a patriarchal society is the main cause of women trafficking. The church also still pays more attention to spiritual services and even participates in perpetuating patriarchal culture so that it has not provided a maximum solution to the phenomenon of women trafficking.*

**Keywords:** *women trafficking; feudalism; second sex; poverty; patriarchal; East Nusa Tenggara; Evangelical Christian Church in Timor*

### **Abstrak**

Studi ini merupakan kajian kritis terhadap sikap Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) terhadap fenomena perempuan yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan mengungkap respon gereja menyikapi fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini terkuak bahwa anggapan perempuan sebagai gender kedua dalam masyarakat patriarkhi menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan perempuan. Gereja juga masih lebih banyak memberikan perhatian pada pelayanan rohani dan bahkan turut melanggengkan budaya patriarkhi sehingga belum memberikan solusi maksimal terhadap fenomena perdagangan perempuan.

**Kata Kunci:** perdagangan perempuan; feodalisme; gender kedua; kemiskinan; patriarkhi; Nusa Tenggara Timur; Gereja Masehi Injili di Timor

## PENDAHULUAN

*International Organization for Migration (IOM)* mencatat pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 jumlah korban perdagangan manusia atau *human trafficking* mencapai 6.651 orang. Dari jumlah itu, 82% adalah perempuan yang bekerja di dalam dan di luar negeri sebagai tenaga kerja informal dan 18% merupakan laki-laki yang mayoritas mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK).<sup>1</sup> Secara umum, jumlah buruh migran dari Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka kasus perdagangan manusia dari NTT menurut data Bareskrim Polri tertinggi di Indonesia, terutama kaum perempuan berumur 15 tahun ke atas yang dijadikan Tenaga Kerja Wanita (TKW), khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan dan negara-negara lain termasuk di dalam negeri. Data *Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)* mencatat pada tahun 2015 terdapat 1.667 TKW asal NTT yang menjadi korban perdagangan manusia. Sementara pada tahun 2016, bulan Januari sampai Juli tercatat sekitar 726 TKW yang bermasalah atau terindikasi praktek perdagangan manusia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur," *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 21–32, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13808>.

<sup>2</sup> Ibid.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjadi cukup dikenal sebagai daerah asal tenaga kerja bermasalah yang dikategorikan dalam kasus perdagangan manusia atau *human trafficking*, setelah munculnya kasus penganiayaan terhadap Nirmala Bonat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga oleh majikannya di Malaysia. Sejak itu bermunculan laporan berbagai kasus perdagangan manusia asal NTT. Pada akhir tahun 2016 NTT tercatat sebagai provinsi dengan kasus perdagangan manusia terbanyak di Indonesia dan ditetapkan sebagai wilayah darurat perdagangan manusia atau *human trafficking* oleh pemerintah RI. Penetapan NTT sebagai wilayah darurat perdagangan manusia tidak serta-merta membuat jumlah kasus perdagangan manusia menurun. Sebaliknya tingkat kematian buruh migran yang dipulangkan dalam keadaan meninggal justru meningkat. Hasil kompilasi data dari berbagai sumber korban *trafficking* asal NTT yang meninggal dunia dari tahun 2011–2019 berjumlah 515 orang.<sup>3</sup>

Selain korban perdagangan manusia yang dipulangkan ke NTT dalam keadaan meninggal tersebut, ada juga yang dipu-

<sup>3</sup> Data yang dihimpun dan diolah hingga Februari 2020, dari berbagai sumber, antara lain dari Pdt. Paolina Bara Pa, Cornelius Selan & Rosna Bernadeta, Relawan BPP Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT dan JPIT.

langkan ke NTT dalam keadaan hidup tetapi dengan kondisi sakit baik fisik maupun psikis, seperti HIV/AIDS, TBC, difable akibat siksaan-siksaan, dan juga kecelakaan kerja, trauma yang mendalam, depresi berat, dan kehamilan yang tidak dikehendaki akibat kekerasan seksual yang dialami dari majikan. Para penyintas perdagangan manusia asal NTT ini sudah mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam proses *trafficking* sejak mulai dari perekrutan, pengiriman, transit, sampai dengan penempatan dan bahkan dalam proses pemulangan.

Realitas yang dialami korban dan penyintas perdagangan manusia di NTT membuktikan kebenaran pernyataan Paus Francis pada pesan Paskah 2013 bahwa, perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan bentuk yang paling luas dari perbudakan pada abad 21 ini. Menurut Bales, “*slavery in modern world, is not about owning people in traditional sense of the old slavery, but about controlling them completely disposable tools for making money.*” Pemilik budak tidak memiliki hak kepemilikan budak secara legal, sebagaimana perbudakan pada masa lampau, namun mereka memiliki kontrol penuh tanpa tanggung jawab apapun terhadap pekerja

yang mereka miliki. Intisari dari perbudakan adalah kontrol penuh terhadap seseorang oleh yang lain untuk tujuan eksploitasi ekonomi.<sup>4</sup> Apa yang dialami korban dan penyintas perdagangan manusia di NTT adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat fundamental terhadap hak-hak asasi manusia, baik yang dilakukan pada saat perang maupun damai sebagai bagian yang sangat luas atau serangan yang sistemik terhadap populasi umat manusia.<sup>5</sup>

Lalu bagaimanakah peran Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) merespon *human trafficking* tersebut? Dalam Haluan dan Kebijakan Umum Pelayanan (HKUP) GMIT tahun 2007–2011 Bidang No. D.18. tertulis program penanganan perdagangan manusia: “mengembangkan pusat-pusat advokasi dan mediasi bagi masalah-masalah yang dialami oleh jemaat, seperti masalah hukum, sosial-politik, hubungan antara umat beragama, gender, tenaga kerja, perdagangan anak dan wanita (*trafficking*), narkoba (*drugs*), kenakalan remaja, dan lain sebagainya.” Namun sampai tahun 2015 GMIT belum melakukan pelayanan untuk merespons isu perdagangan manusia yang signifikan di NTT.

<sup>4</sup> Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2012), 6.

<sup>5</sup> Fausto Pocar, “Human Trafficking: A Crime Against Humanity,” in *Measuring Human*

*Trafficking: Complexities and Pitfalls*, ed. Ernesto U. Savona and Sonia Stefanizzi (New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2007), 5–11.

Baru pada 2016, GMIT, pada tingkat sinode, menjalin kerja sama dengan *Mission21* dan Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) mengadakan lokakarya bersama para pendeta GMIT dan jaringan antariman di NTT yang bergerak dalam isu perdagangan manusia. Selanjutnya menjalin kerja sama dengan Asosiasi Teolog Indonesia (ATI) dan *Kerk in Actie* melalui Jaringan Pendidikan Teologi Indonesia Timur (JPT Intim) mengadakan Simposium Teologi Nasional berjudul “Gereja Melawan Perdagangan Orang” pada 29–31 Mei 2017 di Benlutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pembinaan dari sinode tentang perdagangan manusia dimulai 2017 dan 2018. Tapi tidak semua pendeta mengetahuinya, karena wilayah pelayanan GMIT yang luas. Hanya ada beberapa pendeta dari klasis dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi, yaitu Klasis Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU), yang pernah mengikuti pembinaan dari sinode. Jemaat-jemaat GMIT, di beberapa klasis, baru sebatas seruan, belum ada upaya pencegahan. Pada klasis dan jemaat yang lain, seperti jemaat Tepas dan Haumeni, belum mendapatkan informasi tentang perdagangan manusia. Jika sudah ada masalah, barulah pendeta dihubungi.

Oleh karena itu, melalui kajian yang dilakukan, artikel ini bertujuan untuk menguak konteks yang mempengaruhi persoalan perdagangan manusia, khususnya terhadap kaum perempuan, yang terjadi di NTT dan memberikan evaluasi terhadap peran gereja terhadap fenomena sosial perdagangan manusia ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai fenomena kasus perdagangan manusia di NTT khususnya yang menimpa perempuan NTT dilakukan dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif didasarkan atas pengamatan dan analisis yang mendalam dan komprehensif atas suatu gejala dalam masyarakat. Pendekatan ini memahami masyarakat sebagai fenomena yang terkonstruksi secara sosial dan karena itu penelitian atasnya melibatkan penafsiran yang menyeluruh tentang berbagai konstruksi sosial dan institusional yang membentuknya, dan bahwa dalam penafsiran itu, persepsi tentang realita bersifat jamak dan subyektif.<sup>6</sup> Metode penelitian kualitatif juga memahami tingkah laku manusia menurut sang pelaku perbuatan itu sendiri yang dipengaruhi oleh wawasan, perasaan-perasaan, motif-motif yang bersifat batiniah. Metode ini mencoba mencari data deskriptif tentang sesuatu sebagaimana

---

<sup>6</sup> Normann K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, eds., *Hanbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5-6.

sang subyek memahaminya.<sup>7</sup> Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara personal dan memandang subyek peneliti sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya. Peneliti menangkap pengalaman-pengalaman subyek dalam perjuangan mereka sehari-hari di dalam masyarakat mereka. Peneliti mengkaji tentang kelompok dan pengalaman-pengalaman yang sama sekali belum ia ketahui. Metode ini memungkinkan peneliti membuat dan menyusun konsep-konsep yang hakiki.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan di Klasis Amanatun Selatan, salah satu klasis GMT di Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah Amanatun terdiri dari pegunungan yang terjal dan lembah yang dalam di pedalaman Pulau Timor. Kecamatan Amanatun Selatan merupakan wilayah dengan jumlah pekerja migran terbanyak di TTS. Peneliti tinggal dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Klasis Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui observasi peneliti mengamati apa yang digunakan dan dikerjakan masyarakat serta mendengarkan

apa yang diungkapkan oleh masyarakat Amanatun Selatan dalam beraktivitas sehari-hari khususnya sebagai jemaat GMT di Klasis Amanatun Selatan. Peneliti juga melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data utama. Stainback dalam Sugiyono mengemukakan bahwa melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi saja.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Gender Perempuan sebagai Jenis Kelamin Kedua dalam *Woman Trafficking***

Peran gender tradisional memberi dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan dan anak perempuan. Sering dalam keluarga-keluarga miskin ketika harus memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka, orang tua lebih memilih anak laki-laki untuk disekolahkan. Keyakinan bahwa hal yang paling penting bagi anak perempuan adalah menikah sebelum ia terlalu tua, adalah juga termasuk *gender role* atau peran gender. Termasuk juga kewajiban anak perempuan untuk memelihara keluarga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan do-

<sup>7</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, eds., *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 26-27.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 232.

mestik. Sejak masih kanak-kanak, perempuan telah diharuskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik sebagai suatu kewajiban.

Perkembangan perubahan peran gender yang terjadi di berbagai negara industri maju juga telah berdampak pada industri perdagangan manusia. Pada negara-negara maju, sebagai negara tujuan perdagangan manusia, kaum perempuan sudah tidak lagi percaya dan menghidupi peran gender tradisional itu, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia kerja di luar rumah. Peluang-peluang ini dilihat oleh para pelaku perdagangan manusia untuk menyediakan dan mencari para perempuan dari negara-negara berkembang atau negara-negara miskin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan peran gender tradisional itu.

Perubahan peran gender dan yang diasosiasikan dengan kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan tidak hanya mempengaruhi negara-negara industri maju atau kaya saja, tetapi juga mempengaruhi seluruh wilayah dunia, baik itu kaya maupun miskin. Mempengaruhi peran perempuan, laki-laki dan juga kebutuhan akan pekerja, termasuk juga kebutuhan akan istri atau suami. “Perempuan adalah perempuan dengan

sifat khususnya yang kurang berkualitas,” ujar Aristoteles; “kita harus memandang sifat perempuan yang dimilikinya sebagai suatu ketidaksempurnaan alam.” Sedangkan St. Thomas menganggap perempuan sebagai “laki-laki yang tidak sempurna,” makhluk “yang tercipta secara tidak sengaja.” Hal ini disimbolkan dalam Kitab Kejadian di mana Hawa digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan dari “tulang rusuk” Adam.<sup>10</sup> Demikian kutipan-kutipan yang dipilih Simone de Beauvoir dalam kata pengantar untuk bukunya *Second Sex* yang menunjukkan perempuan sebagai jenis kelamin kedua karena laki-laki adalah subjek, Sang Absolut, sedangkan perempuan hanyalah Sosok Yang Lain atau *Liyan*.

Perempuan sebagai jenis kelamin kedua tidak dapat lepas dari ketimpangan sosial dan problem sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kurangnya akses layanan. Permasalahan-permasalahan tersebut juga merupakan permasalahan yang masih terjadi di wilayah Indonesia Timur. Tingginya kemiskinan dan kesenjangan di bagian Timur, secara langsung meningkatkan kerentanan perempuan terhadap beragam bentuk kekerasan seperti: kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi

---

<sup>10</sup> Simone de Beauvoir, *The Second Sex: Fakta Dan Mitos*, tran. Toni B. Febriantono (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus, 2019), xi.

buruk, putus sekolah, migrasi, dan perdagangan anak. Selain itu terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh perempuan di wilayah Indonesia Timur, khususnya NTT, yaitu perdagangan manusia. Proses migrasi di NTT yang terjadi di daerah-daerah termasuk daerah Amanatun Selatan dimulai sejak tahun 1986.<sup>11</sup> Terjadi gerak migrasi dari desa ke kota, ke luar pulau bahkan ke luar negeri untuk memperebutkan lapangan kerja di sektor modern. Dan terdapat pula sejumlah besar perempuan yang turut terlibat dalam persaingan memperoleh lapangan kerja tersebut, baik dengan migrasi permanen, sementara, maupun komuter (pulang-balik). Kondisi ini disebabkan adanya sistem patriarki dan budaya feodal yang telah mengakar lama dalam masyarakat Timor seperti pada masyarakat Amanatun Selatan, masyarakat *Atoni pah Meto*, yang tergabung dalam Klasis Amanatun Selatan GMIT.

### **Perempuan Timor: Antara Patriarki dan Feodalisme**

Budaya patriarki yang beradaptasi dengan struktur dan sistem kemasyarakatan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat patriarki telah diatur un-

tuk menempati posisi yang telah ada. Perempuan telah dididik untuk menjadi seseorang dengan bentukan masyarakat patriarki, sehingga seringkali mereka tidak menyadari ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat pada adat-istiadat dalam keluarga hingga masyarakat. Posisi perempuan yang berada pada kondisi inferior juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia bagian Timur.

Masyarakat Timor menyebut diri mereka "*Atoni pah Meto*" (orang-orang di tanah kering) yang menyiratkan hidup berpusat pada pedalaman dan tidak berurusan sama sekali dengan pantai atau laut.<sup>12</sup> Masyarakat *Atoni pah Meto* mengenal istilah "*lasi nak atoni*"<sup>13</sup> yang secara harafiah berarti "laki-laki adalah kepala semua urusan." Ungkapan ini menunjukkan bahwa budaya *Atoni pah Meto* menganut sistem patriarki. Dalam masyarakat *Atoni pah Meto* yang patrilineal umumnya pemukiman dimulai dari pola keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Keluarga yang ada akan membentuk klen kecil yang disebut *pulunes*, baru terbentuk kemudian klen besar atau biasa disebut *kanaf* (asal usul marga yang sama) yang dikenal dari marga laki-

orang yang mendiami Pulau Timor dengan kelompok etnis yang berbeda, dengan bahasa yang juga berbeda dan beragam, maka lebih disukai penyebutan kelompok-kelompok yang berbeda itu dengan nama yang mereka sebut sendiri.

<sup>13</sup> Majelis Sinode GMIT, Berita GMIT, Injil dan Adat No.1 tahun 1989.

<sup>11</sup> Kasto, ed., *Profil Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1993), 43.

<sup>12</sup> H. G. Schulte Nordholt, *The Political System of the Atoni of Timor*, tran. M. J. L. van Yperen (Driebergen: The Hague - Martinus Nijhoff, 1981), 1. Nama orang Timor umumnya merujuk semua

laki. *Kanaf* merupakan suatu ikatan genealogis sehingga para anggotanya mempunyai nama klen yang sama dari garis keturunan laki-laki. Mereka memiliki perkampungan atau *kuan* (dusun yang sangat tua) tempat asal usul *Kanaf*. Tiap *Kanaf* mengadakan upacara di rumah adat secara berkala yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang dituaikan, biasanya setiap tahun sekali.

Menurut Schulte Nordholt,<sup>14</sup> masyarakat Timor mempunyai konsep tentang perbedaan status antara perempuan dan laki-laki. Di satu sisi, ketika berbicara dalam konteks pemberi hidup, pemberi hidup dalam hal ini dipahami sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab terhadap keluarga, dan laki-laki statusnya sebagai kepala keluarga (sebagai *giver of live*) merupakan pihak superior. Di sisi lain dalam konteks sumber hidup yaitu berhubungan dengan pengaturan makanan untuk kehidupan dalam keluarga, status perempuan sebagai ibu rumah tangga (sebagai *source of life*) adalah pihak inferior. Dalam kehidupan orang Timor, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan ironisnya diharapkan membantu kehidupan keluarga, termasuk saudara laki-lakinya ketika diperlukan. Berdasarkan wawancara dengan penyintas dan korban, mayoritas para pekerja migran meninggalkan kampung karena persoalan ekonomi

untuk membayar utang, membiayai pendidikan anak atau saudara, memenuhi kebutuhan hidup keluarga, biaya pernikahan saudara laki-laki, tuntutan biaya adat yang tinggi, mengikuti gaya hidup modern, dan melihat kesuksesan teman atau keluarga yang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia.

Di Amanatun Selatan, anak perempuan dan perempuan dewasa yang belum menikah secara adat tidak mempunyai akses terhadap makanan (jagung) yang disimpan di lumbung (tempat penyimpanan jagung). Orang Amanatun menyimpan jagung sebagai makanan pokok mereka di loteng rumah atau di rumah bulat. Ayah/suami, ibu/istri yang telah menikah secara adat, serta anak laki-laki yang belum menikah yang berhak mengambil jagung dari tempat penyimpanan tersebut. Jika keluarga itu belum menikah adat, maka hanya ayah/suami saja yang boleh mengambil jagung dari tempat itu, si ibu/istri tidak diizinkan. Jadi bisa dibayangkan jika seorang ayah atau ibu pergi berhari-hari, dan persediaan makanan di luar lumbung sudah habis, maka anak-anak dan istri (yang belum nikah secara adat) tidak makan, atau harus mencari makan sendiri meskipun di tempat penyimpanan makanan (lumbung/loteng) mereka masih ada makanan (jagung).

---

<sup>14</sup> Nordholt, *The Political System of the Atoni of Timor*, 411-19.

Anak perempuan tidak mendapatkan atau tidak diberikan warisan tanah/kebun dari orang tuanya. Perempuan akan mendapat warisan dari suaminya. Jika tidak menikah, perempuan tetap tidak akan memperoleh warisan. Oleh karena itu, orang tua Amanatun sangat mendesak anak perempuan harus menikah. Orang tua akan mengatakan kepada anak perempuannya yang sudah besar, masih tinggal di rumah dan belum menikah dengan kalimat berikut: “*kok sudah besar begini tidak menghasilkan juga... kita kasih makan terus...*”

Masyarakat *Atoni pah Meto* termasuk Amanatun Selatun mengenal pembagian kerja secara seksual dan pola tingkah laku yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki yang bukan karena berdasarkan kodrati tetapi terbentuk dalam proses belajar dan ditegaskan dalam simbol rumah adat masyarakat *Atoni pah Meto*. Pembagian kerja tersebut telah digariskan dalam budaya dan komunitas adat. Ketika laki-laki memegang fungsi produksi dengan hak milik serta kekayaan lain, maka kedudukan laki-laki semakin kuat. Hal ini menjadikan laki-laki kemudian menguasai perempuan di semua aspek kehidupan, yang pada akhirnya melahirkan sistem patriarki.<sup>15</sup> Pembagian kerja seksual masyarakat *Atoni pah Meto* ditandai

dengan simbol *ike suti* dan *sunni auni*. Simbol *ike suti* merujuk pada identitas perempuan *Atoni pah Meto* dengan wilayah kerja berada pada lingkungan domestik, dan simbol *sunni auni* merujuk pada identitas laki-laki dengan wilayah kerja pada lingkungan publik. Pembagian kerja yang terbentuk dalam masyarakat *Atoni pah Meto* melalui simbol budaya tersebut cukup jelas. Bahkan ukuran kedewasaan seorang perempuan dan laki-laki dilihat dari bercahayaanya *ike suti* dan *sunni auni* di tangan mereka. Keduanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing.<sup>16</sup>

Dalam struktur budaya *Atoni pah Meto*, masyarakat golongan *Usif* (raja) merupakan golongan bangsawan yang sangat dihormati. Mereka juga berkedudukan sebagai kepala suku. Di bawah *Usif* ada *Amaf*, yaitu sekelompok masyarakat yang terdiri dari klen kecil. Sejalan dengan *Amaf* ada *Meo* yang merupakan barisan hulubalang yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari segala ancaman yang datang dari luar daerah. Mereka juga berjuang mempertahankan marga dan kampung halaman dari segala serangan musuh.

Masyarakat *Atoni pah Meto* mengenal sistem genealogi teritorial. Dalam terito-

<sup>15</sup> Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual* (Jakarta: Gramedia, 1981), 22-23.

<sup>16</sup> Eben I. Nuban Timo, *Sidik Jari Allah Dalam Budaya, Upaya Menjajaki Makna Allah Dalam*

*Perangkat Budaya Suku-Suku Di Nusa Tenggara Timur* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2005), 20-26.

ri tersebut terdapat lembaga-lembaga adat yang dipimpin oleh seorang ketua adat dan dianggap sebagai pemegang kuasa tertinggi di desa tersebut. Jabatan ini diberikan sebagai warisan atau berdasarkan keturunan. Dan biasanya pimpinan adat adalah seorang laki-laki tertua dari keturunan bapak yang berasal dari klen pertama. Dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh tetua adat yang dikenal dengan sebutan *temukung*.<sup>17</sup>

### **Evaluasi terhadap Respon Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)**

Respon GMIT sebagai Keluarga Allah ketika diperhadapkan dengan persoalan perdagangan manusia belum memperlihatkan wujud ekspresi prinsip relasional dalam sikap hospitalitas (keramahtamahan), konektifitas (keterhubungan), dan solidaritas (kesetiakawanan) yang memadai dalam relasi antar anggota keluarga Allah sebagai salah satu natura gereja. Sebaliknya, sikap yang diperlihatkan dan dipraktekkan oleh Keluarga Allah itu kepada saudaranya adalah ketidakpedulian dan pembiaran. Gereja sendiri dalam kenyataannya masih mewarisi dan menghidupi pandangan patriarki. Melalui berbagai cara gereja masih menginternalisasi praktik hidup yang mengokohkan pandangan patriarki. Sesuatu yang ter-

jadi karena gereja dalam banyak hal cenderung berdamai dengan struktur dunia yang melegitimasi pandangan patriarki.<sup>18</sup>

Para pendeta dan jemaat menilai isu perdagangan manusia bukan urusan gereja, namun urusan pemerintah. Pada tingkat sinode pun beranggapan demikian. Fokus gereja hanya pada mimbar, doa, dan ritual karena dalam liturgi pentahbisan pendeta GMIT tugas pendeta dilambangkan dengan tiga lambang, Alkitab (bertugas menyampaikan firman Tuhan di mimbar), alat Baptisan dan alat Perjamuan Kudus. Dalam liturgi pentahbisan pendeta itu, gereja tidak memberikan tugas pelayanan sosial kepada seorang pendeta. Hal itu juga berarti gereja tidak diberi tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas berkaitan kehidupan dan persoalan sosial yang terjadi, baik dalam komunitas gereja maupun komunitas masyarakat.

Kehadiran agama sering kali disertai dengan kecenderungan kuat untuk melihat relevansi agama hanya pada lingkup kehidupan rohani yang bersifat individual dan mengabaikan implikasi sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan politik sebagai bagian kehidupan beriman. Hal itu terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia akibat represi agama di zaman otokrasi Suharto. Akibatnya, ketika agama diberi kesempatan

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian, *Sejarah dan Budaya, Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*. (Kupang, 1977). 107.

<sup>18</sup> Besly J.T. Messakh, "Gereja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dan Pelayanan Pastoral," *Jurnal Teologi Sola Experientia* 2, no. 1 (2014): 53–58.

untuk berperan di ruang publik, tetap saja kecenderungan kaum beragama, terutama akar rumput, melihat agama sekedar masalah rohani pribadi.<sup>19</sup>

Peran sosial gereja adalah menyuarakan suara kenabian untuk kebaikan masyarakat dengan visi Kerajaan Allah dan kebenaran Kristus. Gereja menjadi teladan dan agen perubahan yang berpartisipasi bersama Allah dan melibatkan diri sepenuhnya dalam sebuah proses pembebasan menyeluruh (*shalom*) yang dilakukan Allah atas dunia ini sesuai dengan panggilan dan karuniannya. Teologi yang dibangun bukanlah teologi Kristen yang apokaliptik, tetapi teologi yang membebaskan manusia dari kemiskinan, ketertindasan, pengasingan dan eksploitasi alam.<sup>20</sup>

Diamnya gereja, dalam konteks GMTI ini, karena selama ini gereja sekedar membangun identitas. Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas.<sup>21</sup> Identitas keagamaan kemudian melahirkan identitas

politik atau politik identitas yang kerap dipolitisasi. Penguatan identitas kelompok untuk menjadikannya sebagai dominasi dalam sebuah wadah atau bahkan keluar dari wadah disebut sebagai politik identitas atau identitas politik. Agama pun menjadi identitas sekaligus identitas politik dengan mobilisasi dan gerakan yang dilakukan oleh pemimpin agama. Gerakan identitas muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Dalam hal ini mobilisasi secara ideologis diprakarsai oleh para pemimpin seperti pemimpin Gereja maupun tetua masyarakat Amanatun Selatan. Umat dan otoritas gereja menopang eksisnya budaya politik identitas ini di NTT.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan dan perdagangan manusia atau *human trafficking* pada perempuan adalah akibat dari masih dianggapnya perempuan sebagai jenis kelamin kedua dengan segala belitan inferioritas dan posisinya yang subordinat. Kemiskinan dan perdagangan manusia juga merupakan dampak dari himpitan patriarki dan feodalisme yang menekan perempuan dalam ranah domestik. Di sisi lain, komunitas keagamaan seringkali tidak dapat berbu-

<sup>19</sup> Edy J. P. Gurning, "Peran Sosial Gereja Menurut Barth Dan Moltmann [The Social Role of the Church According to Barth and Moltmann]," *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (September 30, 2019): 41–54, accessed March 4,

2022, <https://ojs.uph.edu/index.php/DIL/article/view/1898>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Titik Widayanti, *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria* (Yogyakarta: UGM, 2009), 14.

at banyak dan cenderung diam dikarenakan terjebak dalam konsep di mana agama hanya sekadar menjadi identitas yang rentan dipolitisasi. Agama tidak menjadi inspirasi yang semestinya membawa pembebasan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan, namun hanya sebatas menjadi aspirasi dalam politik identitas di ruang publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bales, Kevin. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2012.
- de Beauvoir, Simone. *The Second Sex: Fakta Dan Mitos*. Translated by Toni B. Febriantono. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2019.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, eds. *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 21–32. <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13808>.
- Denzin, Normann K., and Yvonna S. Lincoln, eds. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Gurning, Edy J. P. "Peran Sosial Gereja Menurut Barth Dan Moltmann [The Social Role of the Church According to Barth and Moltmann]." *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (September 30, 2019): 41–54. Accessed March 4, 2022. <https://ojs.uph.edu/index.php/DIL/article/view/1898>.
- Kasto, ed. *Profil Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1993.
- Messakh, Besly J.T. "Gereja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dan Pelayanan Pastoral." *Jurnal Teologi Sola Experientia* 2, no. 1 (2014): 53–58.
- Nordholt, H. G. Schulte. *The Political System of the Atoni of Timor*. Translated by M. J. L. van Yperen. Driebergen: The Hague - Martinus Nijhoff, 1981.
- Nuban Timo, Eben I. *Sidik Jari Allah Dalam Budaya, Upaya Menjajaki Makna Allah Dalam Perangkat Budaya Suku-Suku Di Nusa Tenggara Timur*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.
- Pocar, Fausto. "Human Trafficking: A Crime Against Humanity." In *Measuring Human Trafficking: Complexities and Pitfalls*, edited by Ernesto U. Savona and Sonia Stefanizzi. New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Widayanti, Titik. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta: UGM, 2009.